

NARASI, KEKUASAAN, DAN PENGAMPUNAN: KAJIAN MAKNA SOSIAL DAN PERTARUNGAN SIMBOLIK PADA ISU AMNESTI DAN ABOLISI HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG

¹Irfany

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti, Kota Makassar¹

Email : irfany@unpacti.ac.id^{1*}

Keyword: *Power, Symbolic Struggle, Amnesty, Abolition.*

Abstract: *The issues of amnesty for Hasto Kristiyanto and abolition for Tom Lembong have sparked intense debate within Indonesia's political and legal spheres. As a policy derived from the President's prerogative rights, it reveals a tension among law, politics, and morality. Public perceptions of the issue vary, depending on how media, politicians, and academics frame the narrative. This study aims to explore how the narratives of amnesty and abolition are constructed and perceived by the public within the context of political communication. The analysis focuses on framing, critical discourse, meaning representation, and the dynamics of interaction among socio-political actors that shape opinion and legitimacy within power relations. Data analysis involved reduction, thematic categorization, discourse interpretation, and mapping the interrelations between discourse, public perception, and political legitimacy. The findings indicate that diverse narrative constructions by media, politicians, and academics along with social dynamics and power relations significantly influence public perception. Dominant voices within the discourse tend to shape public opinion, while critical perspectives are often marginalized. These findings affirm the close interplay among political discourse, public opinion, and legitimacy in shaping collective social understanding.*

Kata Kunci: *Analisis Isi, Kinerja Pemerintah, Bencana Alam, Sentimen Media, Akuntabilitas.*

Abstrak: *Isu amnesti bagi Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong memunculkan perdebatan tajam di ranah politik dan hukum Indonesia. Kebijakan yang bersumber dari hak prerogatif Presiden ini memperlihatkan tarik-menarik wacana antara hukum, politik, dan moralitas. Publik memandang isu ini secara beragam, bergantung pada bagaimana media, politisi, dan akademisi membingkai narasinya. Penelitian ini bertujuan menelusuri pembentukan dan persepsi publik terhadap narasi amnesti dan abolisi dalam konteks komunikasi politik. Analisis difokuskan pada framing, wacana kritis, representasi makna, serta dinamika interaksi para pemangku kepentingan sosial-politik yang memengaruhi opini dan legitimasi publik dalam konteks relasi kekuasaan. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi tematik, interpretasi wacana, serta pemetaan hubungan antara wacana, persepsi publik, dan legitimasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi narasi yang beragam dari media, politisi, dan akademisi, bersama dinamika sosial serta relasi kekuasaan, membentuk persepsi publik secara signifikan. Dominasi suara tertentu dalam wacana turut menentukan arah opini publik, sementara pandangan kritis sering terpinggirkan. Temuan ini menegaskan eratnya kaitan*

antara wacana politik, opini publik, dan legitimasi dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam politik Indonesia, isu amnesti dan abolisi kerap memicu perdebatan publik yang melampaui ranah hukum. Amnesti sering dianggap sebagai instrumen kekuasaan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas, sekaligus menjadi arena pertarungan simbolik sarat makna sosial dan politik. Praktik pengampunan politik tidak pernah netral, karena selalu terkait dengan legitimasi kekuasaan dan persepsi publik terhadap keadilan (Weber, 1978).

Kasus amnesti bagi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP dalam perkara suap PAW DPR, dan usulan abolisi untuk Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan dalam kasus korupsi impor gula, memicu kontroversi luas di ruang publik. Isu ini menggugah sensitivitas masyarakat terhadap keadilan hukum dan menjadi topik hangat di ruang digital. Kompas.com (1 Agustus 2025) menyoroti tarik-menarik antara rekonsiliasi dan manuver politik, sementara Tempo.co (3 Agustus 2025) menekankan kepekaan publik terhadap relasi kekuasaan dan keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengampunan politik telah menembus batas hukum formal dan memasuki kesadaran kolektif masyarakat. Dari perspektif komunikasi, isu ini dapat dibaca melalui narasi, framing, dan wacana. Fisher (1987) menjelaskan bahwa narasi politik membangun legitimasi melalui kisah yang logis dan dipercaya, sementara Entman (1993) menegaskan framing media menentukan cara publik menafsirkan isu. Dalam konteks ini, amnesti dan abolisi dibingkai secara beragam: sebagai kelapangan politik, strategi kekuasaan, atau kebijakan moral.

Dari perspektif sosiologi, isu ini berkaitan erat dengan legitimasi dan opini publik. Weber (1978) menyoroti pentingnya legitimasi dalam menopang kekuasaan, sedangkan Habermas (1989) menekankan peran ruang publik dalam membangun diskursus rasional. Pengampunan politik dapat memperkuat legitimasi bila dianggap adil, atau sebaliknya, melemahkannya bila dipersepsi sebagai politisasi hukum. Fenomena viral kasus Hasto dan Tom Lembong memperlihatkan peran opini publik digital dalam pertarungan simbolik. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen makna di ruang digital. Castells (2009) menegaskan bahwa kekuasaan di era jaringan bergantung pada kendali arus informasi, menjadikan isu ini ajang perebutan narasi di antara aktor politik dan publik.

Penelitian terdahulu menegaskan kaitan antara media, opini publik, dan kebijakan pengampunan. Gunawan (2020) menunjukkan representasi korban dalam framing kasus Baiq Nuril, sedangkan Rahman (2020) menyoroti pengaruh opini publik terhadap legitimasi kebijakan. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek hukum dan media. Penelitian ini mengisi celah itu dengan menggabungkan perspektif komunikasi dan sosiologi untuk memahami pertarungan simbolik dalam isu amnesti dan abolisi.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi dan sosiologi politik melalui analisis narasi dan wacana yang mengungkap relasi antara simbol kekuasaan, legitimasi, dan opini publik. Secara praktis, hasil penelitian ini penting bagi media dan pembuat kebijakan agar mampu mengelola narasi publik secara transparan dan konstruktif. Penelitian ini menegaskan bahwa isu amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong bukan semata perkara hukum, melainkan arena simbolik yang mempertarungkan makna pengampunan politik. Melalui pendekatan komunikasi dan sosiologi, penelitian ini mengungkap keterkaitan antara narasi, kekuasaan, dan makna sosial dalam membentuk persepsi publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) untuk memahami makna, konstruksi wacana, dan dinamika komunikasi

politik dalam isu amnesti dan abolisi. Mengacu pada Moleong (2017), pendekatan kualitatif berupaya menafsirkan fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui penggalian makna mendalam. Pemilihan CDA didasarkan pada pandangan bahwa isu ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan produksi wacana oleh media, politisi, dan akademisi yang membentuk persepsi publik. Sejalan dengan Fairclough (1995), CDA membantu mengungkap relasi kuasa dan kepentingan yang tersembunyi di balik teks dan pernyataan politik. Data penelitian ini berasal dari: Kutipan Pemberitaan Media Kompas, Tempo, Detik.com, Media Indonesia (Editorial) kemudian Kutipan Pernyataan Politisi Nasir Djamil (PKS), Hermawi Taslim (NasDem), Said Abdullah (PDIP), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) serta Kutipan Pandangan Akademisi Prof. Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Dr. Juanda, SH, MH (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Esa Unggul), Feri Amsari (Dosen Hukum Tata Negara, UI) Yance Arizona (Pengamat Hukum Tata Negara).

Adapun Analisis data dilakukan melalui lima tahap: reduksi data untuk menyeleksi informasi relevan, kategorisasi tematik berdasarkan framing media dan model tiga dimensi Fairclough (teks, praktik diskursif, dan praktik sosial), serta interpretasi hubungan antara wacana, persepsi publik, dan legitimasi politik. Selanjutnya, dilakukan coding untuk menandai gagasan utama (Cresswell, 2018) dan analisis pola makna yang muncul. Hasilnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif disertai kutipan yang mendukung. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (media, politisi dan akademisi), triangulasi teori (framing, dan analisis wacana kritis), serta peer debriefing menguji validitas interpretasi melalui penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis framing (define problems, diagnose causes, make moral judgment dan suggest remedies) dilakukan terhadap narasi kutipan media, pernyataan politisi dan pandangan akademisi yang ditemukan pada media online, hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Matriks Kutipan Media

Media	Kutipan	Define Problems (Masalah)	Diagnose Causes (Penyebab)	Make Moral Judgments (Penilaian)	Suggest Remedies (Solusi)
Kompas	“Publik mempertanyakan keadilan dan motif politik di balik amnesti Hasto dan abolisi Tom.”” (Kompaspedia, 2025)	Kebijakan pengampunan politik dianggap ambigu.	Motif kekuasaan dan kepentingan politik pemerintah.	Pemerintah dinilai tidak sepenuhnya netral.	Perlu transparansi dan justifikasi hukum yang kuat.
Tempo	“Amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo memicu perdebatan publik.” (Tempo, 2025)	Kebijakan Presiden memicu kontroversi publik.	Keputusan sepihak tanpa konsensus luas.	Presiden dipersepsikan memakai diskresi kekuasaan.	Perlu mekanisme dialog dan partisipasi publik sebelum keputusan.
Detik.com	“Publik bingung membedakan amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong serta alasan pemberiannya.” (Detik, 2025)	Kebingungan publik tentang istilah dan penerapan.	Kurangnya sosialisasi konsep hukum.	Media menilai pemerintah gagal mengedukasi publik.	Sosialisasi hukum dan edukasi publik harus diperkuat.

Media Indonesia Editorials	“Hubungan antar lembaga harus dijaga agar amnesti dan abolisi tak menimbulkan konflik politik.” (Media Indonesia, 2025)	Potensi konflik antar lembaga negara.	Lemahnya koordinasi eksekutif-legislatif.	Pentingnya menjaga harmoni kelembagaan.	Penguatan koordinasi antar lembaga negara.
-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	---	--

Analisis framing Entman pada Tabel 1, menunjukkan bahwa media memandang isu amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong sebagai kebijakan bermasalah akibat motif kekuasaan dan minimnya transparansi. Media menekankan perlunya keterbukaan, edukasi hukum, dan pengawasan, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berisiko politik.

Tabel 2. Matriks Kutipan Pernyataan Politisi

Aktor / Sumber	Kutipan	Define Problem (Masalah)	Diagnose Causes (Penyebab)	Moral Judgments (Benar/Salah)	Suggest Remedies (Solusi)
Nasir Djamil (PKS)	Menyatakan presiden menunjukkan kenegarawanan dengan memberi amnesti pada lawan politik.	Kontroversi tentang motivasi pengampunan.	Presiden dipandang memilih rekonsiliasi politik.	Tindakan dilihat sebagai sikap berani dan bijak.	Mendorong kepemimpinan berlandaskan persatuan.
Hermawi Taslim (NasDem)	Melihat keputusan sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi publik.	Kurangnya respons politik terhadap publik.	Presiden dianggap peka terhadap kebutuhan rakyat.	Dianggap sangat tepat dan simbolik.	Memperkuat narasi kepekaan politik.
Said Abdullah (PDIP)	Menepis tuduhan bahwa amnesti itu transaksional politik.	Isu transaksi politik terkait amnesti.	Tuduhan muncul akibat pertemuan politik.	PDIP membantah tuduhan, menegaskan murni proses hukum.	Menegakkan integritas dan prosedural hukum.
Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)	“DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan...”	Perlu legitimasi formal melalui DPR.	Kebijakan ini bukan keputusan sepihak eksekutif.	DPR terlibat sehingga ada legitimasi kelembagaan.	Prosedur konsultatif antara eksekutif dan legislatif diperlukan.

Analisis framing Entman pada Tabel 2, menunjukkan bahwa politisi menyoroti aspek legitimasi lebih daripada persoalan hukum. Isu dipandang sebagai upaya rekonsiliasi, bukan kesalahan Presiden. Penilaian moralnya positif Presiden digambarkan sebagai negarawan yang sah dan peka terhadap rakyat. Solusi difokuskan pada penguatan rekonsiliasi dan stabilitas politik melalui peran DPR dan partai.

Tabel 3. Matriks Kutipan Pandangan Akademisi

Tokoh dan Sumber	Define Problems (Masalah)	Diagnose Causes (Penyebab)	Make Moral Judgments (benar/salah)	Suggest Remedies (Solusi)
Prof. Jimly Asshiddiqie (Rakyat Merdeka, 2 Agustus 2025)	Polarisasi politik yang berpotensi memecah bangsa.	Politik Indonesia sedang mengalami ketegangan yang mengingatkan pada krisis 1998.	Menilai keputusan Presiden positif, langkah strategis demi persatuan.	Menerima amnesti/abolisi sebagai strategi rekonsiliasi politik.
Prof. Dr. Juanda, SH, MH (Politik Indonesia.id, 2 Agustus 2025)	Ambiguitas dampak amnesti dan abolisi dalam konteks hukum vs politik.	Perbedaan kerangka berpikir: hukum konstitusi vs kepentingan politik.	Tidak menyalahkan, tetapi mengingatkan bahwa konsekuensi bisa berbeda.	Menekankan perlunya keseimbangan antara legalitas dan legitimasi politik.
Feri Amsari (IslamToday, 1 Agustus 2025)	Penyalahgunaan mekanisme amnesti/abolisi untuk kepentingan politik.	Pemerintah menjadikan pengampunan alat pencitraan.	Mengkritik Presiden; menganggap ini praktik politik, bukan penegakan hukum.	Menuntut agar pengampunan tidak dipakai sebagai alat politik.
Yance Arizona	Terjadi "rule of	Presiden	Menilai ini	Mendorong agar

Interpretasi hasil framing dengan teori Entman pada Tabel 3 menunjukkan bahwa akademisi memandang isu ini sebagai ketegangan antara hukum dan politik. Masalah dilihat sebagai polarisasi dan dominasi politik atas hukum, dengan penilaian moral yang cenderung kritis. Sebagian menilai kebijakan ini positif untuk rekonsiliasi, namun banyak yang menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan. Solusi yang diajukan menekankan pentingnya rule of law, pembatasan kewenangan eksekutif, serta keseimbangan antara legalitas dan legitimasi politik.

Analisis wacana kritis model tiga dimensi Fairclough digunakan untuk menelusuri bagaimana bahasa dalam media, pernyataan politisi, dan pandangan akademisi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial-politik. Melalui analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial, penelitian ini menyingkap bagaimana isu amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong dibentuk, disebarluaskan, dan dipersepsikan publik.

Pendekatan ini menunjukkan perbedaan makna di antara tiga kelompok: media menyoroti masalah dan kompleksitas, politisi menekankan legitimasi keputusan, sementara akademisi memberi pandangan kritis atas aspek hukum dan etika. Analisis didasarkan pada hasil framing kutipan media, pernyataan politisi, dan pandangan akademisi dalam Tabel 1, 2, dan 3.

Berikut tabel matriks hasil analisis wacana kritis dari data pada tabel framing kutipan narasi media, pernyataan politisi dan pandangan akademisi menggunakan model Fairclough:

Tabel 4. Matriks Analisis Wacana Kritis (Fairclough)

Analisis Wacana Kritis			
-------------------------------	--	--	--

Fairclough	Media (Kutipan Narasi)	Politisi	Akademisi
Analisis Teks	• Kompas: narasi ambigu dan kepentingan politik. • Tempo: soroti kontroversi publik. • Detik: bingungkan publik dengan istilah hukum. • Media Indonesia: kehati-hatian, harmoni lembaga.	• Said Abdullah (PDIP) : amnesti sinyal politik, bantah isu transaksional. • Nasir Djamil (PKS): sikap kenegarawanan Presiden. • Hernawi Taslim (NasDem): kepekaan politik Presiden. • Dasco (Gerindra): legitimasi prosedural. • Narasi dominan: legitimasi dan pembenaran.	• Jimly: rekonsiliasi dan persatuan bangsa. • Juanda: ambiguitas hukum vs politik. • Feri Amsari: penyalahgunaan untuk citra politik. • Yance: <i>rule of exception</i> vs rule of law. - Narasi akademisi lebih reflektif dan kritis.
Analisis Praktik Diskursif	• Media memproduksi narasi kritis moderat. • Mengutip pejabat/politisi sebagai sumber legitimasi. • Intertekstualitas kuat dengan wacana elite politik. • Konsumsi publik diarahkan pada problematisasi kebijakan.	• Politisi memproduksi wacana legitimatif sesuai kepentingan partai. • Ada intertekstualitas: saling silang antara pernyataan elite dan media. • Konsumsi diarahkan untuk membangun citra positif Presiden dan partai.	• Akademisi memproduksi wacana reflektif dan normatif. • Media sering mengutip pakar untuk memperkuat otoritas. • Konsumsi publik diarahkan pada kritik dan kesadaran hukum.
Analisis Praktik Sosial	• Konteks sosial: media sebagai <i>watchdog</i> demokrasi. • Konteks politik: menjaga kritisisme publik tanpa frontal. • Ideologi: kontrol kekuasaan, transparansi,	• Konteks politik: stabilisasi kekuasaan, rekonsiliasi oposisi. • Ideologi: rekonsiliasi, legitimasi kekuasaan, partisipasi simbolik. • Praktik sosial: memperkuat hegemoni	• Konteks sosial-politik: ketegangan hukum vs politik. • Ideologi: supremasi hukum, demokrasi substantif, pembatasan kekuasaan. • Praktik sosial:

Analisis wacana kritis model Fairclough pada Tabel 4 menunjukkan bahwa media menyoroti kontroversi, politisi memberi pembenaran, dan akademisi menawarkan kritik berbasis hukum dan demokrasi. Perbedaan ini mencerminkan kepentingan serta posisi wacana masing-masing kelompok.

Hasil analisis wacana kritis pada Tabel 4, memiliki interpretasi sebagai berikut;

Tabel 5. Matriks Interpretasi Hasil Analisis Wacana Kritis Model Fairclough

AWK Fairclough	Media (Kutipan Narasi)	Aktor Politik	Akademisi
Analisis Teks	Media menggambarkan isu dengan penuh kontroversi , menghadirkan ambiguitas dan memicu kebingungan publik , seolah masalah ini tak jelas arahnya.	Politisi membangun teks yang sarat legitimasi , menekankan rekonsiliasi , menampilkan kenegarawanan , dan mengutip prosedural DPR untuk memperkuat posisi.	Akademisi menggunakan teks yang berisi kritik , menegaskan pentingnya rule of law , dan menolak praktik rule of exception yang bisa merugikan demokrasi.
Praktik Diskursif	Wacana media sengaja diarahkan untuk menciptakan problematisasi isu , sehingga publik melihatnya sebagai polemik yang layak diperdebatkan.	Wacana politisi diproduksi sebagai pembenaran , bertujuan memberi citra bahwa keputusan Presiden adalah langkah stabil dan terukur.	Wacana akademisi hadir sebagai suara penyeimbang , memberi peringatan bahwa ada risiko penyalahgunaan kekuasaan bila hukum diabaikan.
Praktik Sosial	Media berkontribusi memperbesar rasa	Politisi berusaha melakukan konsolidasi, memperkuat	Akademisi menegaskan peran sebagai penjaga etika politik

	ketidakpastian politik dan menonjolkan potensi konflik antar-lembaga .	legitimasi politik Presiden melalui kombinasi hukum, simbolik, dan rekonsiliasi.	dan integritas hukum , agar proses politik tidak keluar dari jalur demokratis.
--	--	---	---

Interpretasi hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan bahwa narasi tentang amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong dibingkai secara berbeda oleh tiga aktor utama. Media menonjolkan kontroversi dan keraguan publik, politisi menekankan legitimasi dan rekonsiliasi, sedangkan akademisi menyoroiti pentingnya supremasi hukum dan prinsip rule of law.

Temuan ini sejalan dengan Eriyanto (2012) yang menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai isu sesuai kepentingan ideologis dan politik. Pandangan Titscher dkk. (2000) juga menegaskan bahwa wacana selalu berkaitan dengan struktur sosial dan relasi kekuasaan. Dalam konteks ini, legitimasi politik muncul dari tarik-menarik wacana antara media, politisi, dan akademisi, menjadikan isu amnesti dan abolisi bukan sekadar perkara hukum, melainkan arena pertarungan makna dan simbol kekuasaan.

Pada Tabel 5 ditampilkan kata-kata kunci atau coding yang menjadi penanda utama konstruksi wacana dari masing-masing kelompok. Pada level teks, media menekankan kata-kata seperti kontroversi, ambiguitas, dan kebingungan publik. Sementara itu, politisi menggunakan kata-kata legitimasi, rekonsiliasi, dan kenegarawanan, serta merujuk pada prosedural DPR. Akademisi menandai kata-kata kritik, rule of law, dan rule of exception.

Pada level praktik diskursif, media menandai kata problematisasi, politisi menekankan pembenaran, dan akademisi menggunakan istilah suara penyeimbang serta peringatan. Sedangkan pada level praktik sosial, media menonjolkan kata-kata ketidakpastian politik dan konflik antar-lembaga, politisi menekankan legitimasi politik, dan akademisi menyoroiti etika politik dan hukum.

Dengan menampilkan kata-kata kunci secara eksplisit, tabel 5 memperlihatkan bagaimana konstruksi wacana terbentuk secara berbeda pada masing-masing kelompok narasi, namun tetap saling terkait dalam membentuk persepsi publik dan legitimasi politik. Menentukan kata kunci atau coding dalam penelitian ini bukan sekadar langkah teknis. Melainkan cara menyingkap makna di balik setiap narasi. Melalui kata kunci, penelitian ingin melihat bagaimana isu terbentuk sebagai konstruksi sosial, hasil interaksi media, politisi, dan akademisi. Relasi kekuasaan berperan besar dalam membentuk persepsi terhadap isu. Weber menegaskan bahwa legitimasi dan otoritas politik menentukan sejauh mana pesan dapat diterima dan dipercaya publik. Habermas menyoroiti pentingnya komunikasi rasional sebagai upaya membangun pemahaman bersama antaraktor sosial. Sementara Noelle-Neumann menjelaskan bahwa opini mayoritas dan tekanan sosial dapat menciptakan spiral of silence yang membungkam sebagian suara minoritas.

Dengan demikian, kata kunci dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami keterkaitan antara kekuasaan, opini publik, dan komunikasi. Keterpaduan ketiganya memperlihatkan bahwa persepsi terhadap isu politik selalu dibentuk melalui interaksi sosial dan dinamika kekuasaan yang kompleks. Hal tersebut tergambar pada tabel matriks di bawah ini yang menunjukkan keterhubungan antara hasil coding dari analisis wacana kritis media, politisi, dan akademisi dengan teori Max Weber, Jürgen Habermas, dan Noelle-Neumann.

Tabel 6. Matriks Korelasi Kata Kunci Analisis Wacana Kritis Media, Aktor Politik dan Akademisi dengan Teori Max Weber, Jürgen Habermas dan Noelle-Neumann

Coding Analisis Wacana Kritis	Weber – Legitimasi Kekuasaan	Habermas – Ruang Publik & Distorsi Komunikasi	Noelle-Neumann – Opini Publik & Spiral of Silence
-------------------------------	------------------------------	---	---

Kontroversi, Ambiguitas, Kebingungan Publik (Media)	Menunjukkan lemahnya legitimasi legal-rasional , karena dasar hukum tampak tidak jelas dan memunculkan keraguan.	Menggambarkan distorsi komunikasi , sebab media lebih menonjolkan konflik dibanding memberi ruang diskusi rasional.	Membentuk kondisi spiral of silence , di mana publik yang bingung cenderung diam dan mengikuti arus narasi dominan.
Legitimasi, Rekonsiliasi, Kenegarawanan, Prosedural DPR (Politisi)	Upaya memperkuat legitimasi kekuasaan lewat kombinasi legal-rasional (prosedur DPR), kharismatik (kenegarawanan), dan politik (rekonsiliasi).	Menunjukkan ruang publik yang dikendalikan elite, sehingga komunikasi lebih berfungsi sebagai alat legitimasi ketimbang ruang diskursus terbuka.	Membentuk opini mayoritas yang mendukung elite; opini berbeda cenderung melemah atau memilih diam.
Kritik, Rule of Law, Rule of Exception, Penyeimbang (Akademisi)	Menegaskan pentingnya menjaga legal-rasional legitimacy agar tidak dikalahkan oleh kepentingan politik maupun karisma individu.	Upaya mengembalikan wacana ke dalam diskursus rasional , menantang distorsi komunikasi yang dibangun elite dan media.	Menjadi suara minoritas dalam spiral of silence , sering tersisih, namun penting sebagai penyeimbang opini publik.

Pada Tabel 6 terlihat bahwa dari perspektif Max Weber, isu amnesti dan abolisi tidak sekadar persoalan hukum, melainkan strategi legitimasi kekuasaan. Media menyoroti kontroversi dan kebingungan publik yang menandakan rapuhnya dasar legal-rasional, sementara politisi melalui narasi rekonsiliasi dan kenegarawanan berupaya memperkuat legitimasi kekuasaan. Akademisi dengan kata kunci kritik dan rule of law berperan menjaga agar legitimasi tidak menyimpang ke arah rule of exception. Dengan demikian, konstruksi wacana ini menunjukkan bagaimana kekuasaan selalu berupaya mencari pijakan legitimasi yang dapat diterima publik.

Dari perspektif Jurgen Habermas, coding memperlihatkan ruang publik yang bekerja namun sarat keterbatasan. Media cenderung menghadirkan distorsi komunikasi melalui penekanan pada kontroversi, sementara politisi memanfaatkan wacana legitimasi untuk membenarkan keputusan politik. Akademisi berusaha mengembalikan wacana ke arah dialog rasional, tetapi tarik-menarik kepentingan membuat ruang publik sulit mencapai kondisi ideal sebagaimana diasumsikan Habermas.

Sementara menurut Noelle-Neumann, coding menyoroti terbentuknya opini publik dalam dinamika spiral of silence. Media yang menonjolkan kebingungan publik membuat masyarakat enggan bersuara kritis, sedangkan politisi membentuk opini dominan melalui narasi rekonsiliasi dan kenegarawanan. Akademisi tetap menyuarakan kritik, namun sering berada di posisi minoritas. Dengan demikian, teori ini menjelaskan mengapa suara dominan semakin kuat sementara suara kritis kerap tenggelam dalam wacana publik.

Analisis ini menegaskan bahwa isu amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong tidak sekadar berita politik atau hukum, tetapi hasil konstruksi wacana yang berlapis. Media menonjolkan kontroversi, politisi membangun legitimasi, dan akademisi menegaskan prinsip rule of law. Berbeda cara membingkai isu ini akhirnya membentuk persepsi publik yang beragam antara ragu, menerima, hingga waspada terhadap kekuasaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa wacana yang dibangun media, politisi, dan akademisi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk cara pandang masyarakat dan meneguhkan posisi politik. Dalam pandangan Weber, hal ini tampak sebagai pencarian legitimasi kekuasaan; menurut Habermas, terjadi distorsi komunikasi di ruang publik; dan dalam kerangka Noelle-Neumann, suara dominan kian menguat sementara suara kritis sering terpinggirkan.

KESIMPULAN

Narasi amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi Tom Lembong terbentuk melalui komunikasi politik yang berbeda dari media, politisi, dan akademisi. Media menonjolkan kontroversi yang memunculkan kebingungan publik; politisi menggunakan narasi rekonsiliasi dan kenegarawanan untuk memperkuat legitimasi; sementara akademisi menekankan kritik dan rule of law. Dinamika kekuasaan membuat suara dominan lebih mudah membentuk opini publik, sedangkan pandangan kritis sering terpinggirkan. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap isu ini dipengaruhi bukan hanya oleh informasi, tetapi juga oleh cara pihak-pihak berpengaruh membingkai dan mengendalikan narasi, menegaskan keterkaitan antara komunikasi politik, legitimasi, dan relasi kekuasaan.

Penelitian ini memberikan pemahaman agar media menghadirkan pemberitaan berimbang, politisi membangun legitimasi berbasis hukum dan transparansi, serta akademisi menjaga keseimbangan wacana publik. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan hubungan antara komunikasi politik, framing media, dan kekuasaan dalam membentuk persepsi publik; secara praktis, hasilnya dapat menjadi panduan bagi semua pihak untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih bijak, inklusif, dan mendukung diskursus publik yang sehat

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi ideologi dan politik media*.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fisher, W. R. (1987). *Human communication as narration: Toward a philosophy of reason, value, and action*. University of South Carolina Press.
- Gunawan, A. (2020). *The Case of Criminalized Victim Baiq Nuril: A Narrative Case Study of Female Representation in Indonesian Media*. Institute for Gender Studies, Ochanomizu University.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Noelle-Neumann, E. (1984). *The spiral of silence: Public opinion Our social skin*. University of Chicago Press.
- Rahman, A. (2020). *Framing atas advokasi kebijakan: Analisis framing petisi amnesti untuk Nuril [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]*.
- Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2000). *Methods of text and discourse analysis*. Sage Publications.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. University of California Press.
- Detik.com. (2025, 31 Juli). *Prabowo akan terbitkan Keppres terkait abolisi dan amnesti*. <https://news.detik.com/berita/d-8039378/prabowo-akan-terbitkan-keppres-terkait-abolisi-dan-amnesti>
- Detik.com. (2025, 1 Agustus). *Babak baru nasib Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto usai dapat abolisi-amnesti*. <https://news.detik.com/berita/d-8039672/babak-baru-nasib-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-usai-dapat-abolisi-amnesti>

- Detiknews. (2025, 4 Agustus). *Istana soal Hasto–Tom Lembong: Dua kasus ini lebih bernuansa politik*. <https://news.detik.com/berita/d-8044277/istana-soal-hasto-tom-lembong-2-kasus-ini-nuansanya-lebih-masalah-politik>
- HukumOnline. (2025, 1 Agustus). *Ketika politik jadi panglima penegakan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi pada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-politik-jadi-panglima-penegakan-hukum-dalam-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-hasto-kristiyanto-dan-tom-lembong-lt688c7f1096a2b>
- IslamToday.id. (2025, 1 Agustus). *Feri Amsari: Abolisi dan amnesti tunjukkan peradilan politik, bukan antikorupsi*. <https://islamtoday.id/news/20250801114315-196853/feri-amsari-abolisi-untuk-tom-amnesti-untuk-hasto-kristiyanto-tunjukkan-peradilan-politik-bukan-antikorupsi>
- Kompaspedia. (2025). *Amnesti dan abolisi: Demi hukum atau kepentingan politik?* <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/amnesti-dan-abolisi-demi-hukum-atau-kepentingan-politik>
- Kompas.com. (2025, 1 Agustus). *Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi Tom Lembong*. [Posting Facebook Kompas.com]
- Media Indonesia. (2025, 1 Agustus). *Pakar hukum tata negara: Pemberian amnesti dan abolisi bukan transaksi politik*. <https://mediaindonesia.com>
- Media Indonesia. (2025, 4 Agustus). *Saling menghormati untuk abolisi–amnesti*. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3937-saling-menghormati-untuk-abolisi-amnesti
- PolitikIndonesia.id. (2025, 2 Agustus). *Guru Besar Hukum Tata Negara: Abolisi dan amnesti hak konstitusional Presiden*. <https://politikindonesia.id>